

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355-369.
- Ilhami, R. (2023). POLICY NETWORK MANAGEMENT IN TOURISM SECTOR POLICY. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 3(02), 199-207.
- Ilhami, R., Affandi, N. R., & Hartawan, Y. (2021). Strategi Komunikasi Kontrol Jejaring Kebijakan Dalam Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin (Gebrak Pakumis) Di Kabupaten Tangerang. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 214-222.
- Satibi, Iwan. "Metode Penelitian Administrasi Publik." (2017).
- Rahu, P. D. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 13-24.
- Mariane, I., Palls, A., & Ariesmansyah, A. (2022). Model Policy Network Dalam Menunjang Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Kuningan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 171-180.
- Mariane, I., Suryadi, S., Firdausijah, T., & Ilhami, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Public Private Partnership Bagi Peningkatan Pariwisata Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 71-76.
- Molan, K. (2022). JEJARING KEBIJAKAN PARIWISATA BUDAYA DI DESA LEWOKLUOK KABUPATEN FLORES TIMUR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 6(2), 127-138.
- Nugroho, A. Y. (2022). *PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA NONGKOSAWIT KOTA SEMARANG* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Nurazkia, N., Herlina, D., & Ramdani, A. (2023). Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya). *Indonesian Journal of Social Science*, 1(1), 41-48.

- Permatasari, S. J. (2022). PENGEMBANGAN PROGRAM DESA WISATA BERBASIS JEJARING BISNIS DI DESA TAMANSARI KABUPATEN BANYUWANGI. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(2), 133-139.
- Pugra, I. W., Oka, I. M. D., & Suparta, I. K. (2021). Kolaborasi Pentahelix Untuk Pengembangan Desa Timpag Menuju Desa Wisata Berbasis Green tourism. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 7(2), 111-120.
- Purba, G. P., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). *MODEL JARINGAN AKTOR DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA WISATA WONOLOPO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG\07\ADM. PUBLIK\2021* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).
- Saputra, D. (2020). Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 85-97.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Suwitri, S. (2011). *Jejaring Kebijakan Publik: Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintahan*. Badan Penerbit Unersitas Diponegoro.
- Syahrudin, E., Apriliani, A., Hernawan, D., & Ramdani, F. T. (2023). Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Karimah Tauhid*, 2(5), 2184-2192.
- Tryan Aryana, L. (2023). *PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA CURUG BADAK BATU HANOMAN DESA SUKASETIA KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA*.
- Wicaksono, F. (2022). *JEJARING KEBIJAKAN DALAM PROGRAM AKTIVASI RUANG KERJA BERSAMA DI KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG* (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS).
- Waarden, F. Van. (1992). Dimensions and types of policy networks. *European Journal of Political Research*, 1989, 29–52

Dokumen

Dokumen Desa Wisata Alamendah

Keputusan Bupati Bandung Nomor 556.42/Kop/72-Dispapar/2011 Tentang Penetapan Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Bandung

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Bandung

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung. No. 07 Tahun 2020 tentang program pengembangan Desa Wisata.

UU No. 10 Tahun 2009 Pasal 11 Tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, kebijaksanaan yang digariskan adalah bahwa yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora, dan fauna hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia.